

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY ON THE FISCAL DECENTRALIZATION DEGREE IN PEKANBARU FOR THE PERIOD OF 2011-2020 WITH GROWTH OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AS THE MEDIATING FACTOR

Helly Aroza Siregar¹

¹Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

Email: hellyaroza@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the level of financial effectiveness and efficiency and to analyze the direct and indirect effects of these variables on fiscal decentralization, mediating by the growth of PAD in Pekanbaru City from 2011 to 2020. The method of data analysis is descriptive statistical analysis and path analysis. The results of the study show that in the last decade the Pekanbaru City Government's financial performance had been in the "less effective" and "inefficient" categories, PAD growth has fluctuated, while the Degree of Fiscal Decentralization is in the "moderate" category. Financial effectiveness and efficiency have no effect, either on PAD Growth or on Fiscal Decentralization. However, PAD Growth can strengthen the effect of effectiveness and efficiency on Fiscal Decentralization.

Keywords: *Effectiveness; Efficiency; PAD Growth; Fiscal Decentralization*

ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DENGAN MEDIASI PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PEKANBARU PERIODE 2011-2020

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan dan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel tersebut terhadap desentralisasi fiskal, dengan mediasi dari pertumbuhan PAD di Kota Pekanbaru tahun 2011 sampai dengan 2020. Metode analisis data adalah dengan analisis statistik deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru berada dalam kategori "kurang efektif" dan "tidak efisien", Pertumbuhan PAD berfluktuasi, sementara Derajat Desentralisasi Fiskal berada dalam kategori "sedang". Efektivitas dan efisiensi keuangan tidak berpengaruh, baik pada Pertumbuhan PAD maupun pada Desentralisasi Fiskal. Namun, Pertumbuhan PAD dapat memperkuat pengaruh efektivitas dan efisiensi terhadap Desentralisasi Fiskal.

Kata Kunci: Efektivitas; Efisiensi; Pertumbuhan PAD; Desentralisasi Fiskal

PENDAHULUAN

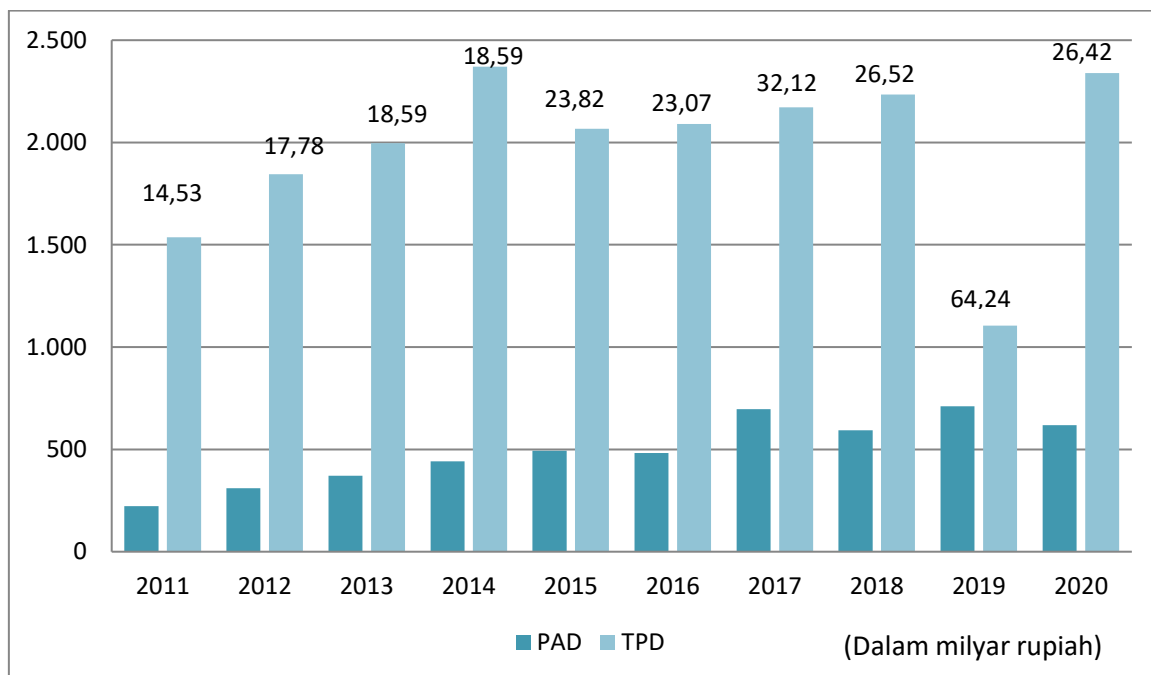
Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik saat ini sudah berada pada kondisi point no return, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta quality improvement. Dengan demikian, ke depannya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan (Christia & Ispriyarso, 2019).

Urgensi pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia merujuk pada keberhasilan negara-negara lain dalam pemerataan pembangunan di daerah dengan lebih cepat setelah beralih pada sistem desentralisasi. Sebagai contoh, Jepang menunjukkan pembangunan yang lebih cepat dan seimbang setelah dilaksanakannya Rencana Pembangunan Total Nasional di tahun 1970, negara-negara Eropa mencapai pemerataan yang baik dalam pembangunannya juga setelah melakukan pembangunan yang lebih berorientasi kepada pemerintah lokal dan Amerika Serikat dengan sistem negara federalismenya (Sumardi, 2014).

Meskipun reformasi keuangan daerah yang menggunakan sistem desentralisasi sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, namun setelah lebih dari 20 tahun reformasi ini berjalan, penyelenggaraan desentralisasi fiskal di daerah masih belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal pada daerah tertinggal sangat rendah (Sari, 2014).

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri (Pekel, 2016: 7; Ramadhan, 2019). Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin (Machmud et al., 2014). Pengelolaan keuangan secara mandiri ditunjukkan dengan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang murni berasal dari daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemampuan pemerintah Kota Pekanbaru dalam meraih PAD sehingga tidak bergantung pada sumber dari luar dalam bentuk dana perimbangan menunjukkan besarnya derajat desentralisasi fiskal di Kota Pekanbaru. artinya semakin besar persentase PAD jika dibandingkan dengan seluruh Pendapatan Daerah, maka semakin baik pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan desentralisasi fiskal di daerah. Gambar berikut ini menunjukkan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Pekanbaru dalam satu dekade (2011 – 2020).



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, dan Hasil Data Diolah (2023)

Gambar 1. Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Pekanbaru Periode Tahun 2011 -2020

Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa persentase PAD terhadap TPD masih sangat kecil. Derajat Desentralisasi Fiskal tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan persentase PAD dibandingkan TPD sebesar 64,24%. Sementara Derajat Desentralisasi Fiskal terendah terjadi pada tahun 2011 dimana persentase PAD jika dibandingkan dengan TPD adalah kurang dari 15%. Secara rerata tingkat Desentralisasi Fiskal di Kota Pekanbaru adalah 26,47%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber anggaran keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

masih bergantung dari sumber-sumber keuangan diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, perlu diketahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskal di Kota Pekanbaru, sehingga sumber keuangan tidak bergantung terlalu banyak dari luar.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal itu sendiri, dikenal adanya filosofi *money follow function* sebagai prinsip utama yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Azwar, 2022; Fatoni, 2020; Mudayen & Maridjo, 2018; Siregar & Badrudin, 2017). Prinsip tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, seyogyanya disertai dengan penyerahan sumber-sumber pendanaannya (Azwar, 2022). Idealnya, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Fatoni, 2020).

Pelimpahan wewenang untuk mengelola anggaran oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien, mengingat pelaksanaan pemerintahan merupakan suatu amanat rakyat yang mana dibiayai dengan dana yang bersumber dari rakyat. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan PAD di daerah karena timbulnya kepercayaan masyarakat untuk menyetorkan pajak dan sumber PAD lainnya yang dipungut oleh pemerintah. Dengan pertumbuhan PAD tersebut, maka desentralisasi fiskal seperti yang diharapkan dan diamanatkan oleh Undang-Undang akan dapat tercapai dengan maksimal.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi dan efektivitas di Provinsi Jambi pada periode 2010-2014 (Harahap & Nasution, 2019). Namun demikian hasil penelitian dari Christy et al., (2019) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah belum bisa memberikan dampak positif terkait dengan desentralisasi fiskal yang dijalankan di Sulawesi Utara.

Berdasarkan berbagai permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dari kinerja keuangan pemerintah yaitu efektivitas dan efisiensi keuangan terhadap desentralisasi fiskal dan untuk melihat pengaruh tidak langsung kinerja keuangan tersebut terhadap desentralisasi fiskal melalui mediasi dari pertumbuhan PAD di Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 8, desentralisasi adalah pengalihan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dasar prinsip yang harus diperhatikan adalah *money follow function*, artinya pengalihan atau pendelegasian otoritas pemerintah menimbulkan suatu konsekuensi bahwa anggaran yang diberikan akan membawa pelimpahan wewenang kepada daerah (Mudayen & Maridjo, 2018).

Menurut The World Bank (2008), desentralisasi fiskal pada dasarnya adalah pengalihan tanggung jawab dalam pengelolaan pengeluaran dan pendapatan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rani, 2020). Desentralisasi fiskal adalah proses pendelegasian wewenang (anggaran) dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dalam rangka mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Aulia, 2014).

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi (Litvack & Seddon, 2002). Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 97). Sementara Litvack dan Seddon (1992: 2) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah (fungsi publik) dari pemerintah kepada daerah bawahan) atau organisasi semi-mandiri (instansi vertikal) atau kepada pihak swasta (Elsye, 2013: 20-21). Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintahan di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya (Khusaini, 2006: 97).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu pelimpahan anggaran yang menyebabkan timbulnya wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di daerah yang pada awalnya dilaksanakan oleh pusat. Dengan kata lain, tugas-tugas pemerintahan di daerah, dalam konsep desentralisasi fiskal diurus oleh Pemerintah Daerah dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang pengelolaannya telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal diukur dengan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Mahi & Supriyanti, 2019; Salma Nazikha & Rahmawati, 2021; Sistiana & Makmur, 2014)

Analisis Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal dengan Mediasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru Periode 2011-2020 (Helly Aroza Siregar)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku (Siregar, 2017: 23; Siti Fatimah & Handayani, 2021).

PAD adalah penerimaan rutin didalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan (Machmud et al., 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014), Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahsun et al., (2015: 170) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning organisasi. Kinerja keuangan diukur dengan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja (Magdalena et al., 2013; Nurabiah, 2018; Taufik, 2017).

Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian Pemerintah Daerah yang diukur dengan rasio keuangan. Beberapa rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah.

Efisiensi dan efektifitas dapat melihat suatu keadaan keuangan yang mempergunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara ekonomis, hemat efisiensi) dan dilakukan secara tepat dan memenuhi sasaran (efektif) serta hasil yang dicapai tersebut memiliki rasionalitas terhadap penggunaan sumber-sumber yang ada (Lisawati & Priyono, 2021).

Rasio efektivitas menunjukkan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang semakin baik (Zen, 2023). Rasio efektivitas diukur dengan membandingkan antara Realisasi PAD terhadap Target PAD (Lisawati & Priyono, 2021; Machmud et al., 2014; Zen, 2023).

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu (Cicilia et al., 2019). Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Fathah, 2017).

METODE PENELITIAN

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder. Data sekunder meliputi data rasio keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru yang diolah dari data Laporan Anggaran dan Realisasi APBD Kota Pekanbaru. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi (Litvack & Seddon, 2002). Berdasarkan hal ini maka, rasio desentralisasi fiskal sudah seharusnya menunjukkan perbandingan antara sumber pendapatan asli daerah yaitu PAD dengan seluruh sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk total Pendapatan Daerah. Dengan demikian rumus rasio desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah pertumbuhan PAD. Pertumbuhan PAD menunjukkan seberapa besar PAD bertambah atau berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun rumus pertumbuhan PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{(\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1})}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ardilla & Putri, 2015; Berliani, 2016; Fathah, 2017; Harahap & Nasution, 2019). Berdasarkan hal ini maka rumus efektivitas keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Keuangan} = \frac{\text{Anggaran PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Fathah, 2017). Berdasarkan hal ini maka rumus efisiensi keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data diawali dengan uji statistik deskripsi dengan melihat nilai maksimal, minimal dan rata-rata dari data rasio keuangan, kemudian menentukan kategori dari hasil rasio tersebut. Adapun kategori dalam menentukan efektivitas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100%	Sangat efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup efektif
>60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: *Keppmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996*

Kategori dalam menentukan tingkat efisiensi keuangan daerah adalah berpedoman pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100%	Tidak efisien
>90%-100%	Kurang Efisien
>80%-90%	Cukup Efisien
>60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: *Keppmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996*

Sementara Derajat Desentralisasi Fiskal dianalisis dengan berpedoman pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kriteria Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria
0 – 10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber: *Zukhri (2020)*

Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil uji tidak bias dan konsisten maka dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF, sementara uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji Glejser.

Analisis Regresi

Untuk menganalisis pengaruh efektivitas dan efisiensi keuangan daerah terhadap desentralisasi fiskal, dengan mediasi dari pertumbuhan PAD, digunakan analisis jalur (*path analysis*). Teknik analisis jalur (*path analysis*) ini akan digunakan dalam pengujian besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel independen yaitu Efektivitas (X_1) dan Efisiensi (X_2) terhadap Pertumbuhan PAD (Y) dan Desentralisasi Fiskal (Z) sebagai variabel independen, serta melihat apakah Pertumbuhan PAD (Y) berperan dalam meningkatkan pengaruh dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model struktural yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

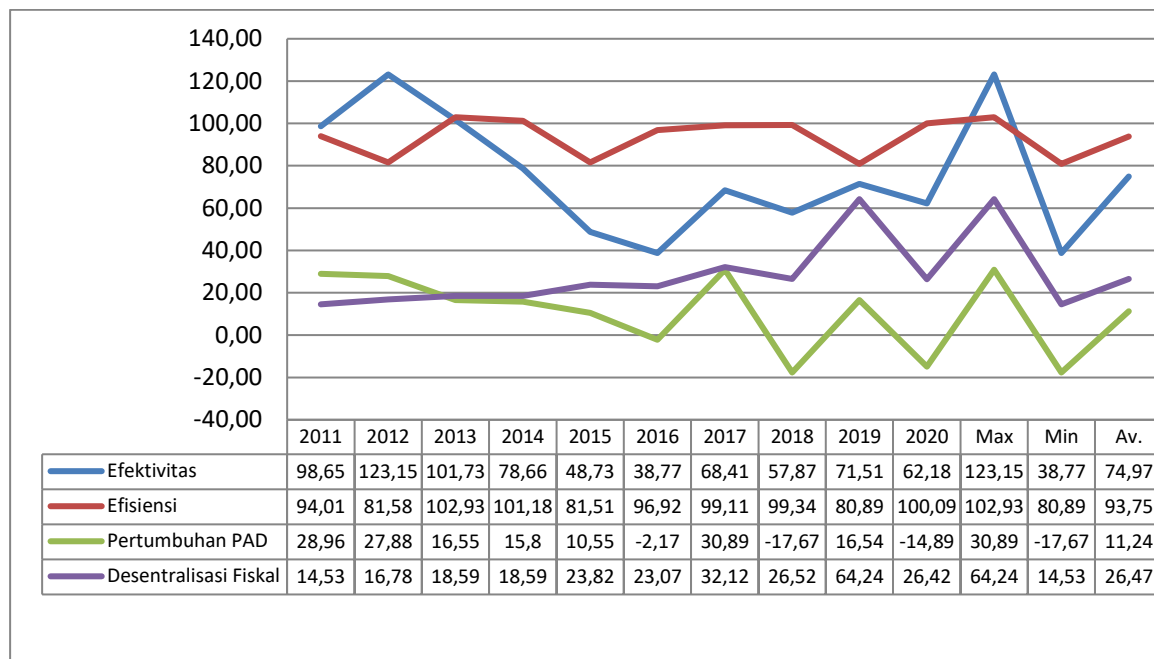
$$\text{Persamaan struktural 1: } Y = \rho_0 + \rho_{yX1}X_1 + \rho_{yX2}X_2 + \rho_{yC1}$$

$$\text{Persamaan structural 2: } Z = \rho_0 + \rho_{zX1}X_1 + \rho_{zX2}X_2 + \rho_{zy}Y + \rho_{zC}$$

Analisis Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal dengan Mediasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru Periode 2011-2020 (Helly Aroza Siregar)

HASIL DAN PEMBAHASAN**Statistik Deskriptif Data Penelitian**

Berikut adalah data kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2011 sampai dengan 2020:



Gambar 2. Data Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020

Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa secara rata-rata efektivitas keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru berada pada angka 74,79% dimana hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam kategori “kurang efektif”. Artinya, kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merealisasikan anggaran PAD yang sudah ditargetnya masih jauh dari harapan. Kemampuan merealisasikan PAD yang ditargetkan ini bahwa pernah berada dalam kategori “tidak efektif” dengan angka persentase 38,77%. Namun demikian, kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru pernah berada dalam kategori “sangat efektif” pada tahun 2012 dan 2013.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru secara rerata adalah mencapai persentase 93,75 dengan kategori “kurang efisien”. Artinya, besarnya Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah menghabiskan lebih dari 90% dari Pendapatan Daerah yang diperoleh. Tingkat efisiensi keuangan terbaik terjadi pada tahun 2019 dimana rasio efisiensi sebesar 80,89% dengan kategori “cukup efisien”, sementara tingkat efisiensi terendah terjadi pada tahun 2013 dengan rasio efisiensi sebesar 102,93% dengan kategori “tidak efisien”. Kondisi tidak efisien menunjukkan bahwa pemerintah mengeluarkan dana Belanja Daerah yang terlalu besar, melebihi Pendapatan Daerah yang ada.

Pertumbuhan PAD di Kota Pekanbaru berfluktuatif. Secara umum pertumbuhan PAD menurun dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Pertumbuhan PAD terbaik terjadi pada tahun 2017, dimana pertumbuhan PAD meningkat lebih dari 30% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Namun pertumbuhan PAD kembali menurun drastis pada tahun 2018.

Derajat Desentralisasi Fiskal yang menunjukkan kemandirian daerah otonom menunjukkan fluktuasi dalam satu dekade terakhir. Secara rata-rata Desentralisasi Fiskal dalam satu dekade terakhir adalah 26,47 dengan kategori “sedang”. Desentralisasi Fiskal pernah dalam kategori “sangat baik” pada tahun 2019 dimana besarnya PAD jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah adalah sebesar 64,24%.

Hasil Uji Model

Untuk memperoleh hasil regresi yang dapat memberikan hasil yang tepat dalam estimasi, tidak bias dan konsisten maka dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Hasil uji normalitas dengan menggunakan persamaan $Y = p_0 + p_1X_1 + p_2X_2 + p_3C_1$ diperoleh hasil uji normalitas yaitu data terdistribusi normal dengan nilai Asymp. Sig. adalah 0,943. Sementara hasil uji normalitas dengan menggunakan persamaan $Z = p_0 + p_1X_1 + p_2X_2 + p_3Y + p_4C$ diperoleh hasil Asymp. Sig. adalah 0,874, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Adapun uji asumsi klasik dari kedua persamaan tersebut diperoleh hasil tidak terjadi multikoliinearitas maupun heterokedastisitas. Dengan demikian model regresi pada penelitian ini sudah baik.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diukur dengan melihat angka R square. Angka koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Tabel 4 berikut menunjukkan hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Dependen Variabel	Independen Variabel	Nilai R^2
1	Pertumbuhan PAD (Y)	Efektivitas (X_1); Efisiensi (X_2)	0,446
2	Desentralisasi Fiskal (Z)	Efektivitas (X_1); Efisiensi (X_2) dan Pertumbuhan PAD (Y)	0,273

Sumber: Hasil Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Efektivitas (X_1) dan Efisiensi (X_2) dapat menjelaskan terjadinya pertumbuhan PAD (Y) di Kota Pekanbaru sebesar 44,6%, sedangkan 55,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model 1 pada penelitian ini. Kemudian, variabel Efektivitas (X_1) dan Efisiensi (X_2) dan Pertumbuhan PAD (Y) dapat menjelaskan variabel Desentralisasi Fiskal (Z) sebesar 27,3%, sedangkan 72,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain dari pada variabel independen yang terdapat pada model 2.

Hasil Uji Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis tentang pengaruh variabel independen yaitu Efektivitas (X_1) dan Efisiensi (X_2) terhadap Pertumbuhan PAD (Y), serta menjawab hipotesis tentang pengaruh C Efektivitas (X_1) dan Efisiensi (X_2) dan Pertumbuhan PAD (Y) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) dapat diketahui dari Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Persamaan Struktural

Dependen Variabel	Independen Variabel	Nilai Sig.	Keputusan
Pertumbuhan PAD (Y)	Efektivitas (X_1)	0,074	Tidak berpengaruh
	Efisiensi (X_2)	0,430	Tidak berpengaruh
Desentralisasi Fiskal (Z)	Efektivitas (X_1)	0,425	Tidak berpengaruh
	Efisiensi (X_2)	0,296	Tidak berpengaruh
	Pertumbuhan PAD (Y)	0,892	Tidak berpengaruh

Sumber: Hasil Data Diolah (2023)

Hasil Uji Koefisien Jalur

Tabel 6 menunjukkan hasil uji koefisien jalur dengan melihat hasil standardized coefficients pada hasil uji regresi. Sementara nilai koefisien jalur pada persamaan struktural 2 dengan Pertumbuhan PAD (Y) sebagai variabel intervening diperoleh dengan melakukan perkalian antara nilai koefisien jalur antara variabel Pertumbuhan PAD (Y) dengan nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen, yaitu Efektivitas (X_1) dan Efisiensi (X_2).

Tabel 6. Koefisien Jalur

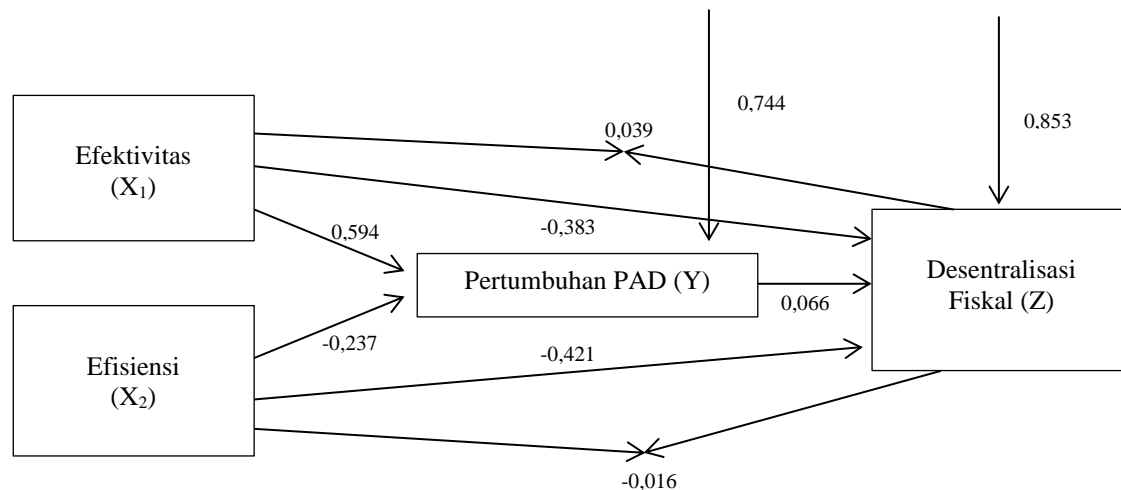
Dependen Variabel	Independen Variabel	Intervening Variabel	Koefisien Jalur
Pertumbuhan PAD (Y)	Efektivitas (X_1)	-	0,594
Pertumbuhan PAD (Y)	Efisiensi (X_2)	-	-0,237
Desentralisasi Fiskal (Z)	Efektivitas (X_1)	-	-0,383
Desentralisasi Fiskal (Z)	Efisiensi (X_2)	-	-0,421
Desentralisasi Fiskal (Z)	Pertumbuhan PAD (Y)	-	0,066
Desentralisasi Fiskal (Z)	Efektivitas (X_1)	Pertumbuhan PAD (Y)	0,039
Desentralisasi Fiskal (Z)	Efisiensi (X_2)	Pertumbuhan PAD (Y)	-0,016

Sumber: Hasil Data Diolah (2023)

Adapun pengaruh variabel intervening dalam memediasi variabel independen dan dependen adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan Efektivitas (X_1) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) adalah sebesar -0,383. Sedangkan pengaruh tidak langsung Efektivitas (X_1) melalui Pertumbuhan PAD (Y) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) adalah perkalian antara nilai beta (ρ) X_1 terhadap Y yaitu 0,594 dengan nilai beta (ρ) Y dengan Z yaitu 0,066, sehingga diperoleh hasil 0,039. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh langsung Efektivitas (X_1) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) lebih kecil dari pada pengaruh tidak langsung Efektivitas (X_1) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) melalui mediasi Pertumbuhan PAD (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan PAD dapat memediasi atau memperkuat hubungan antara kinerja efektivitas keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mempengaruhi Desentralisasi Fiskal di Kota Pekanbaru. (2) Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa pengaruh langsung Analisis Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal dengan Mediasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru Periode 2011-2020 (Helly Aroza Siregar)

yang diberikan Efisiensi (X_2) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) adalah sebesar $-0,421$. Sedangkan pengaruh tidak langsung Efisiensi (X_2) melalui Pertumbuhan PAD (Y) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) adalah perkalian antara nilai beta (ρ) X_1 terhadap Y yaitu $-0,237$ dengan nilai beta (ρ) Y dengan Z yaitu $0,066$, sehingga diperoleh hasil $-0,016$. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh langsung Efisiensi (X_2) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) lebih kecil dari pada pengaruh tidak langsung Efisiensi (X_2) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) melalui mediasi Pertumbuhan PAD (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan PAD dapat memediasi atau memperkuat hubungan antara kinerja efisiensi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mempengaruhi Desentralisasi Fiskal di Kota Pekanbaru.

Sementara untuk melihat pengaruh dari faktor-faktor diluar model regresi pada penelitian ini, maka dicari nilai C pada masing-masing model. Dimana: $C = \sqrt{1-R^2}$, sehingga, $C_1 = \sqrt{1-R_1^2} = \sqrt{1} - 0,446 = 0,744$; dan $C_2 = \sqrt{1-R_2^2} = \sqrt{1} - 0,273 = 0,853$. Berdasarkan nilai koefisien jalur pada Tabel 3 di atas dan nilai C_1 dan C_2 maka dapat dibuat gambar diagram jalur seperti yang terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil Analisis Jalur

Pembahasan

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam satu dekade terakhir (2011-2020) dalam kategori “kurang efektif”. Artinya, kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merealisasikan anggaran PAD yang sudah ditargetnya masih jauh dari harapan. Kategori kurang efektif menunjukkan bahwa target PAD yang sudah ditetapkan terlalu tinggi, sehingga sulit untuk direalisasikan atau dapat diduga bahwa personil pemerintahan masih belum maksimal dalam mengumpulkan sumber-sumber PAD yang sudah ditetapkan tersebut.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam satu dekade terakhir (2011-2020) secara rerata berada dalam kategori “kurang efisien”. Semakin kecil pengeluaran daerah jika dibandingkan dengan besarnya Pendapatan Daerah maka tingkat efisiensi keuangan akan semakin baik. Belanja Daerah yang terlalu besar pada dasarnya adalah hal yang baik, karena pemerintah menggunakan dana anggaran untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Namun, dilain sisi, penggunaan dana anggaran untuk Belanja Daerah yang semakin kecil akan memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan investasi sehingga dapat menjadi sumber dalam meningkatkan PAD.

Pertumbuhan PAD di Kota Pekanbaru berfluktuatif. Kondisi pertumbuhan PAD yang ideal adalah dimana Pertumbuhan PAD meningkat dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari berbagai potensi di daerah. Pertumbuhan PAD di Kota Pekanbaru bahkan negatif atau menurun pada tahun 2016, 2018 dan tahun 2020. Pertumbuhan PAD negatif merupakan suatu koreksi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kinerja yang lebih baik untuk meningkatkan PAD di daerah dalam mencapai tingkat Desentralisasi Fiskal yang baik.

Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Pekanbaru, pada kenyataannya menunjukkan fluktuasi dalam satu dekade terakhir. Secara rata-rata Desentralisasi Fiskal berada dalam dengan kategori “sedang”, dimana besarnya PAD yang diperoleh oleh pemerintah berkisar antara dua puluh sampai dengan tiga puluh persen jika dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah. Desentralisasi Fiskal baru dapat mencapai posisi sangat baik jika proporsi PAD lebih besar dari setengah Pendapatan Daerah. Tingginya Derajat Desentralisasi Fiskal di daerah menunjukkan bahwa amanat Undang-Undang untuk mengalihkan anggaran yang sekaligus diiringi dengan tugas dan fungsi pemerintahan yang dilimpahkan (*money follow function*) sudah dijalankan dengan baik, dimana besarnya penghasilan yang bersumber dari daerah itu sendiri sudah mampu menjadi sumber dana dalam pembangunan di daerah, atau dengan kata lain, pemerintah daerah sudah tidak bergantung pada bantuan dari pihak eksternal.

Kinerja efektivitas dan efisiensi keuangan daerah sudah seharusnya dapat meningkatkan PAD di daerah. Jika pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan dengan baik, dengan menggunakan dana anggaran secara efektif dan efisien, maka PAD di daerah akan dapat ditingkatkan. Hal ini karena, adanya kepercayaan dari pihak-pihak yang menyetorkan PAD untuk mempercayakan pajak, retribusi, dan sumber PAD lainnya untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, baik efektivitas maupun efisiensi keuangan tidak memberikan pengaruh pada pertumbuhan PAD. Tingkat efektivitas dan efisiensi yang masih belum maksimal dapat dijadikan sebagai penyebab. Pengelolaan keuangan daerah yang masih belum efektif dan efisien akan menyebabkan besarnya pertumbuhan PAD menjadi tidak maksimal.

Idealnya, pelaksanaan kinerja keuangan yang efektif dan efisien merupakan suatu syarat mutlak dalam mencapai tingkat desentralisasi fiskal yang baik di daerah. Daerah yang sudah mampu membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah, sebagai pelimpahan wewenang dari Pusat, menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal sudah mencapai keberhasilan. Untuk mencapai hal ini maka, pemerintah daerah harus mampu mewujudkan kinerja keuangan yang efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja efektivitas dan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak berpengaruh pada Desentralisasi Fiskal di daerah ini. Hal ini dapat disebabkan karena tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan yang masih belum baik.

Meskipun kinerja efektivitas dan efisiensi keuangan di Kota Pekanbaru tidak memberikan pengaruh, baik pada Pertumbuhan PAD maupun pada Desentralisasi Fiskal, namun, interaksi antara kinerja efektivitas dan efisiensi dengan Pertumbuhan PAD dapat meningkatkan pengaruhnya pada Desentralisasi Fiskal. Artinya, jika kinerja efektivitas dan efisiensi diintervensi dengan Pertumbuhan PAD, maka akan dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap Desentralisasi Fiskal di daerah.

PENUTUP

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru secara rata-rata dalam satu dekade terakhir (2011-2020) dalam kategori “kurang efektif” dan “kurang efisien”, sementara pertumbuhan PAD berfluktuatif, dan Derajat Desentralisasi Fiskal dalam kategori “sedang”. Hasil uji analisis jalur menunjukkan bahwa Pertumbuhan PAD dapat memediasi hubungan antara efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dalam mempengaruhi terjadinya Desentralisasi Fiskal.

Implikasi dan saran dari penelitian ini adalah, pertama pelimpahan tugas dan wewenang dalam era Desentralisasi Fiskal di Kota Pekanbaru harus dilaksanakan dengan lebih baik. Mengingat rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal yang masih belum baik. Selanjutnya, pelaksanaan penggunaan anggaran APBD Kota Pekanbaru, sebaiknya tidak hanya memperhatikan kemampuan dalam merealisasikan Belanja Daerah saja, namun harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi keuangan sebagai dasar dari indikator kinerja keuangan daerah. Terakhir, disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat menggali penyebab fluktuasi PAD di Kota Pekanbaru sehingga dapat diketahui cara untuk meningkatkan PAD dalam upaya Desentralisasi Fiskal yang maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulia, N. (2014). Hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012. *Economics Development Analysis Journal*.
- Azwar. (2022). Analisis Dinamis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Belanja Kesehatan Dan Kesejahteraan: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. *Info Artha*, 6(1), 49–62. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/1621/879/7587>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Christy, E., Walewangko, E. N., & Wauran, P. C. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 1–12.
- Cicilia, V. S. E., Murni, S., & Engka, D. (2019). ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*. <https://doi.org/10.35794/jpekd.10245.17.2.2015>
- Elsye, R. (2013). *Desentralisasi Fiskal*. Alqaprint Jatinangor.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Fatoni, A. (2020). Fiscal Decentralization Dilemma in Indonesia: Between Corruption Accountability and Probability at Local Levels. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 101–110. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.101-110>
- Harahap, J. P. R., & Nasution, M. D. (2019). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja

Analisis Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal dengan Mediasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru Periode 2011-2020 (Helly Aroza Siregar)

- Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 9–14. <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22406>
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE Unibraw.
- Lisnawati, & Priyono, N. (2021). Efisiensi dan Efektifitas Partisipasi Anggaran pada SKPD. *ECODUCATION Economics & Education Journal*, 3(1), 100–109. <http://ejournal.budiutomomalang.ac.id/index.php/ecoducation>
- Litvack, J. I., & Seddon, J. (2002). Decentralization Briefing Notes: Strengthening Operational Skills in Community Driven Development. In *World Bank Institute Working Paper*.
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007–2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1–13.
- Magdalena, M., Kurniawan, C. H., Pengajar, S., Ekonomi, F., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2013). PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA. *MODUS*.
- Mahi, B. R., & Supriyanti, S. S. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 118–138. <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.879>
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Mudayen, Y. M. V., & Maridjo, H. (2018). The Impacts of Fiscal Decentralization, Institutional Transformation, and Regional Revenue on Income Disparities between Provinces in Indonesia. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 20(3), 247–259. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i2.878>
- Nurabiah, N. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.36>
- Pekei, B. (2016). *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Taushia.
- Ramadhan, F. N. (2019). *Analisis Kemandirian, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat* [Universitas Negeri Makassar]. <http://eprints.unm.ac.id/11817/>
- Rani, G. C. (2020). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Dengan Kinerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Pemda di Indonesia Tahun 2017-2018)* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31519/PUBLIKASI.pdf?sequence=10&isAllowed=y>
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014).
- Salma Nazikha, R., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 120–134. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134>
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Sari, R. (2014). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 79–99.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. UPP STIM YKPN.
- Siregar, B., & Badrudin, R. (2017). Degree of fiscal decentralization and flypaper effect: Evidence from Indonesia. *Advanced Science Letters*. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.10014>
- Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten/kota. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(4), 277–286. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/2216>
- Siti Fatimah, & Handayani, T. (2021). Analisis Pertumbuhan Dan Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Product Domestic Regional Brutto (Pdrb) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016–2019. *Journal of Economics and Business*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i2.81>
- Sumardi. (2014). Determinan Efektivitas Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah; (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Journal of Rural and Development*, 5(2), 147–166.
- Taufik. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera (Comparative Analysis of Government Financial Performance Cities In Sumatran). *Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi*, 7(1), 993–1012.
- The World Bank. (2008). *Fiscal Decentralization*. http://web.worldbank.org/archive/website01061/WEB/0__CO-11.HTM#:~:text=Fiscal decentralization is essentially the,to lower levels of government.
- Zen, N. H. (2023). *Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menuju Kemandirian Daerah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat*. [Institut Pemerintah Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/12611/1/RINGKASAN SKRIPSI NAJMATUL HAYA ZEN.pdf>